LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) PT BPR GUNUNG SLAMET TAHUN 2021

Jalan Dr. Wahidin No 31 Cilacap
TELEPON: 0282532871

BAB I
PENJELASAN UMUM

Laporan Penerapan Good Corporate Governance dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/ SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian GCG dilakukan dengan metode self-assessment berdasarkan laporan – laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya, penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko.
Pelaksanaan prinsip Good Corporate Government (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan prinsip GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaaan pemegang saham dan stakeholders, meminimalisir risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek fraud sehingga Bank dapat tumbuh berkembang.
Maka PT. BPR Gunung Slamet pada tahun 2021 merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2021, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan nilai - nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta penerapan prinsip - prinsip dasar GCG yaitu:

1. Keterbukaan (Transparency).
2. Akuntabilitas (Accountability).
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
4. Independensi (Independency)
5. Kewajaran (Fairness)

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Irawan Jayasaputra, SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a) Menjalankan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. b) Melakukan membuat RBB bersama Direksi lainnya dan Komisaris setiap tahun. c) Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. d) Menggalang kerjasama yang baik dengan nasabah Deposan, Penabung, Pemda, Masyarakat, Instansi-Instansi dan Organisasi lainnya. e) Melaksanakan RBB yang telah disusun dan apabila ada perubahan meminta persetujuan Komisaris. f) Direktur Utama wajib menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha dan seluruh tingkatan organisasi. g) Direktur Utama wajib mendalami Peraturan OJK No. 12/2017 tentang APU dan PPT dan melaksanakan peraturan tersebut. h) Memahami dan melaksanakan Peraturan OJK No. 12/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko. i) Direktur Utama selalu menjaga ratio Bank baik likuiditas, profitabilitas, maupun rentabilitas serta menjadikan bank yang sehat. j) Direktur Utama mengangkat, memberhentikan, dan memutasikan pegawai sesuai dengan ketentuan Bank. k) Direktur Utama memutus kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam meminjam uang, menjual, dan membeli barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. l) Meningkatkan pengembangan SDM dan kesejahteraan karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. m) Pada saat- saat diperlukan mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pemegang Saham Pengendali.		
2.	Nama	:	Kukuh Dwi Prasetio, SE
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a) Bersama dengan jajaran Direksi menetapkan strategi- strategi strategis untuk mencapai Visi dan Misi Bank. b) Bersama dengan jajaran Direksi yang lain mengelola Bank agar Bank dapat tumbuh dan berkembang untuk menjadi Bank yang sehat, Bank yang kuat menghadapi persaingan dan terpercaya di masyarakat dengan menepati kewajiban- kewajiban membayar kembali hak- hak masyarakat berupa tabungan, deposito, hutang-hutang dan kewajiban lain. c) Menindaklanjuti temuan audit intern / ekstern BPR, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK. d) Mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan kepada pemegang saham dan RUPS. e) Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat merugikan Bank. f) Bersama dengan bagian terkait mengembangkan produk-produk Bank. g) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan		

operasional Bank (RBB jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang).
h) Membuat standar operasional Bank mengenai semua proses operasional, produk-produk dan ketentuan-ketentuan baru.
i) Membuat strategi dalam pemenuhan target Bank dengan cara bagaimana mencapai target tersebut.
j) Mengecek dan mengawasi semua kegiatan opersional Bank.
k) Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai dengan SOP Bank.
l) Bertanggungjawab pada pengembangan kualitas SDM dan produk produk Bank.
m) Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada Direktur Utama.
n) Menyampaikan laporan-laporan kepada Pemegang Saham.
o) Menetapkan kebijakan-kebijakan Bank.
p) Memimpin seluruh karyawan dalam menjalankan bisnis Bank.
q) Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris / Direktur Utama perkembangan Kredit maupun Dana.
r) Melakukan peninjauan/ pengontrolan terhadap nasabah kredit dan melakukan penagihan-penagihan bersama bersama petugas Kredit.
s) Bersama-sama dengan jajaran kredit menekan serendah mungkin tunggakan dan NPL.
t) Bersama-sama dengan jajaran Direksi menjaga tingkat Kesehatan Bank.

3.	Nama	:	Dwi Aribowo, SE
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab :

a) Bersama dengan jajaran Direksi menetapkan strategi- strategi strategis untuk mencapai Visi dan Misi Bank.
b) Bertanggungjawab terhadap fungsi Kepatuhan pada BPR
c) Melaporkan hasil penilaian dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan Bank.
d) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
e) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
f) Membuat rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan Bank secara berkala.
g) Memberikan saran dan masukan kepada Direktur Utama atas hasil penilaian dan evaluasi tingkat kepatuhan Bank.
h) Meminimalkan resiko Kepatuhan Bank.
i) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.
j) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit intern / ekstern BPR hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK.
k) Direksi wajib membentuk Satuan Kerja Manajemen Resiko, Komite Management Resiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan.
l) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Management Resiko secara tertulis
m) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
n) Mengembangkan budaya Management Resiko pada seluruh jajaran organisasi
o) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang masih terkait dengan Management Resiko.
p) Memastikan bahwa fungsi Management Resiko telah beroperasi secara independent.
q) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Management Resiko dan Eksposur resiko yang dilakukan BPR secara keseluruhan.
r) Direksi wajib menyusun kebijakan pengawasan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi resiko TPPU, APU dan PPT
s) Penanggungjawab penerapan program APU dan PPT baik di kantor Pusat maupun kantor cabang
t) Memastikan bahwa aktivitas Bank telah dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, perjanjian dan komitmen dengan OJK serta peraturan dan kebijakan internal yang berlaku
u) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola Bank secara berkala.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Anggota Direksi telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, dengan realisasi pencapaian RKAT tahun 2021 serta pelaksanaan komitmen hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal yang dilakukan selama tahun

2021.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Sentot Sujiono
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a) Memastikan terselenggaranya penerapan GCG BPR diseluruh tingkatan/jenjang organisasi. b) Komisaris Utama wajib dengan itikad baik kehati- hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan BPR. c) Memberikan Laporan tentang tugas pengawasan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS. d) Komisaris Utama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman dan berhak memeriksa uang kas dll serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan Direksi. e) Perseroan meminjam uang ke pihak lain harus dengan Persetujuan Komisaris Utama. f) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Management Resiko. g) Memastikan penerapan Management Resiko oleh Direksi. h) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas kebijakan Management Resiko. i) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris. j) Komisaris Utama wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen. k) Komisaris Utama dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR terkecuali ketentuan BMPK. l) Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif dalam hal APU/PPT. m) Komisaris Utama wajib menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan agenda Rencana Bisnis BPR, isu strategis, evaluasi/ penetapan kebijakan strategis, evaluasi realisasi rencana bisnis BPR, penetapan rencana bisnis 1 tahun sekali. n) Memimpin Bank apabila Direktur Utama dan Direksi berhalangan / tidak ada. o) Memberhentikan sementara waktu jika Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan yang berlaku. p) Melakukan pengawasan dan on the spot terhadap nasabah kredit dan dana. q) Membuat laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap 6 (enam) bulan sekali perkembangan jalannya Perseroan. r) Melakukan kunjungan kepada Nasabah Macet dengan mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah selanjutnya.		
2.	Nama	:	Bambang Wijanarko
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a) Membantu Komisaris Utama dalam melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam management Bank serta memberikan nasehat demi kemajuan dan keamanan Bank. b) Memimpin Bank apabila Dirut, Direktur, Komisaris Utama berhalangan. c) Mengawasi kegiatan Bank dan mengontrol Realisasi dan Rencana Anggaran. d) Melakukan Pengawasan dan pengontrolan Kredit dan DPK dan melaporkan ke Komisaris Utama. e) Bersama Dirut dan Komisaris Utama menyusun Rencana Kerja. f) Melakukan rapat komisaris setiap triwulan bersama Direksi dan Staf menindaklanjuti hasil rapat gabungan group. g) Mempresentasikan hasil pengawasan ke OJK. h) Membantu Komisaris Utama dalam melapor ke OJK setiap 6 bulan.		

3.	Nama	:	Mujijat
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a) Membantu Komisaris Utama dalam melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam management Bank serta memberikan nasehat demi kemajuan dan keamanan Bank. b) Memimpin Bank apabila Dirut, Direktur dan Komisaris Utama berhalangan. c) Mengawasi kegiatan Bank dan mengontrol Realisasi dan Rencana Anggaran. d) Melakukan pengawasan dan pengontrolan Kredit dan DPK serta melaporkan ke Komisaris Utama dan Direksi. e) Bersama Direksi dan Komisaris lainnya menyusun RBB Bank. f) Mempresentasikan hasil pengawasan di OJK apabila diminta. g) Membantu Komisaris Utama dalam membuat laporan ke OJK setiap 6 bulan. h) Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola (Tarif) pada setiap kegiatan usaha dari seluruh struktur organisasi dari atas sampai ke bawah. i) Komisaris wajib memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit intern / ekstern hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK. j) Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang- undangan dibidang keuangan dan perbankan atau keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha yang dilakukan karyawan kepada Direksi. k) Dewan Komisaris agar membentuk Komite Audit, Pemantauan Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. l) Rapat Kerja Dewan Komisaris paling sedikit 4 kali dalam satu tahun dan agendanya rencana bisnis BPR, isu-isu strategis BPR, evaluasi kebijaksanaan strategis dan evaluasi rencana kerja. m) Dewan Komisaris dilarang menggunakan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain, yang dapt merugikan Bank. n) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada Bank. o) Dewan Komisaris menyetujui, mengevaluasi, memastikan penerapan management resiko oleh Direksi. p) Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi terhadap pelaksanaan APU dan PPT.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
Dalam hal pemberian rekomendasi kepada Direksi serta menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Kehadiran di kantor BPR dilakukan setiap hari. 2. Menyelenggarakan rapat dewan komisaris minimal 4 kali dalam 1 tahun. 3. Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi, dengan pengawasan langsung (OTS) dan tindakan langsung dengan memeriksa berkas-berkas yang ada. 4. Menyetujui pembuatan Pedoman, Kebijakan yang bermanfaat bagi operasional BPR.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern. b) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan public dengan standar audit.

	c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR. d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan public, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lain. e) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Bambang Wijanarko	Keuangan dan Perbankan	Ketua (Komite Audit)	Iya
			Ketua (Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
2.	A. Umbu Tellu	Hukum	Anggota (Komite Audit)	Iya
			(Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
3.	Agung Sungko Wardoyo	Manajemen Risiko dan Keuangan	(Komite Audit)	Iya
			Anggota (Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
4.	Teguh Imam Sujudy	Akuntansi dan Keuangan	Anggota (Komite Audit)	Iya
			Anggota (Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	a) Menyusun program kerja komite audit 2022. b) Mereview dan mengevaluasi rencana dan pelaksanaan tugas Divisi Satuan Kerja Audit Internal. c) Memberikan rekomendasi atas penunjukkan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. d) Melaksanakan rapat dengan satuan kerja yang bertanggung jawab untuk memonitor tindak lanjut hasil temuan Divsi Satuan Kerja Audit Internal, OJK dan KAP (dengan nara sumber dari Divisi Audit Intern, Divisi Kepatuhan atau Divisi Lain yang ditunjuk bertanggung jawab atas tindak lanjut temuan). e) Melaksanakan rapat dengan satuan kerja atau penanggung jawab produk- produk bank yang dipandang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris, misalnya Kredit Khusus UMKM, Kredit Pegawai, kredit kerjasama dengan instansi lain, perkembangan penanganan NPL, dll. f) Melaksanakan tugas- tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris. g) Berdasarkan hasil rapat, review dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komite Audit, akan dibuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal- hal yang dianggap signifikan untuk disampaikan kepada Direksi dengan catatan agar ditindak lanjuti oleh Direksi. h) Komite Audit juga akan mengagendakan rapat gabungan dengan Komite Pemantau Risiko untuk mendapat gambaran kondisi Bank yang lebih luas, sehingga dapat memberikan masukan yang lebih komprehensif kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi.
	Realisasi	:	a) Monitoring atas tindak lanjut temuan OJK yang difokuskan pada risiko kredit risiko operasional dan aktivitas Teknologi Sistem Informasi, Evaluasi terhadap Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Penerapan Good Corporate Governance dan hasil pemeriksaan tahun 2021 oleh Divisi Audit Intern. b) Penunjukkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadiono & Rekan untuk pemeriksaan laporan keuangan PT BPR Gunung Slamet untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. c) Penyampaian Hasil Audit Semester I dan II

			tahun 2021. d) Pemantauan terhadap kredit usaha produktif. Saat ini kredit yang diberikan masih di dominasi oleh kredit konsumtif, sehingga diharapkan manajemen membuat action plan untuk meningkatkan porsi kredit produktif seperti pembiayaan UMKM yang belum digarap dengan baik. e) Rasio maupun volume kredit kualitas rendah cenderung mengalami peningkatan, sehingga jika tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan laju pertumbuhan rasio kredit non performing (NPL) di atas batas tingkat toleransi yang dapat diterima oleh Bank.
	Jumlah Rapat	:	4
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	Komite Pemantau Risiko akan mengadakan rapat dengan Divisi Manajemen Risiko secara berkala dan sewaktu- waktu dapat mengadakan rapat sesuai kebutuhan, untuk membahas laporan yang dibuat oleh Divisi Manajemen Risiko kepada pihak manajemen dan OJK yang meliputi : - Laporan Profil Risiko Bank - Laporan Tingkat Kesehatan Bank - Laporan Good Coorporate Governance - Topik lain yang dipandang penting sesuai dengan kondisi terkini • Komite Pemantau Risiko melakukan rapat dengan Direktur Kepatuhan untuk membahas Laporan Kepatuhan Bulanan dan/ atau topik lain yang dipandang penting sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh Bank. • Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko. • Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian Direksi, dan juga akan memantau tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Direksi.
	Realisasi	:	a) Evaluasi laporan hasil penilaian (self assessment) Tingkat Kesehatan Bank setiap bulan yang mencakup penilaian Profil Risiko (terdiri dari 6 risiko), Pelaksanaan GCG, Rentabilitas dan Permodalan. b) Terkait dengan situasi atas beberapa sektor ekonomi tertentu yang secara nasional mengalami kenaikan rasio non performing loan (NPL), Manajemen diminta untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi yang lebih serius terhadap sektor- sektor tersebut termasuk kredit- kredit yang masuk dalam kategori perhatian khusus. Hal tersebut perlu diantisipasi agar ke depan tidak menjadi memburuk dan menyebabkan rasio NPL Bank

			menjadi meningkat. c) Pemantauan terhadap Notaris yang belum menyelesaikan pengurusan pengikatan jaminan debitur yang berlarut- larut agar dilakukan tindakan yang lebih proaktif yakni melalui jalur hukum karena jika tidak akan berdampak pada meningkatnya risiko kredit, risiko hukum, reputasi dan kepatuhan serta dapat mempengaruhi penilaian GCG Bank.
	Jumlah Rapat	:	4
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Irawan Jayasaputra, SE	Rp204.000,00	1.02%
2.	Kukuh Dwi Prasetio, SE	Rp0,00	0%
3.	Dwi Aribowo, SE	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Irawan Jayasaputra, SE	600619	PT. BPR Gunung Simping Artha	4.9%
2.	Irawan Jayasaputra, SE	600621	PT. BPR Citanduy Artha	4.2%
3.	Irawan Jayasaputra, SE	620146	PT BPRS Gunung Slamet	6.5%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Irawan Jayasaputra, SE	Tidak ada	Tidak ada	Mudjadi Djajadinata - Orang tua, Palupi Nuraeni Mudjadi - Kakak Kandung, Bagas Waskito Kuncoro - Kakak Kandung, Fitri Parliyanti - Kakak Kandung
2.	Kukuh Dwi Prasetio, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Dwi Aribowo, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Irawan Jayasaputra, SE	Tidak ada	Tidak ada	Mudjadi Djajadinata - Orang Tua, Palupi Nuraeni Mudjadi - Kakak Kandung, Bagas Waskito Kuncoro - Kakak Kandung, Fitri Parliyanti - Kakak Kandung
2.	Kukuh Dwi Prasetio, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Dwi Aribowo, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sentot Sujiono	Rp0,00	0%
2.	Bambang Wijanarko	Rp0,00	0%
3.	Mujijat	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sentot Sujiono	-	-	0%
2.	Bambang Wijanarko	-	-	0%
3.	Mujijat	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Sentot Sujiono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bambang Wijanarko	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Mujijat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Sentot Sujiono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bambang Wijanarko	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Mujijat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp404.400.000,00	3	Rp259.200.000,00
2.	Tunjangan	3	Rp78.000.000,00	3	Rp48.000.000,00
3.	Tantiem	3	Rp1.170.000.000,00	3	Rp455.000.000,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp1.652.400.000,00		Rp762.200.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Nihil.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Rumah Dinas (3)	Rumah Dinas (3)
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (3)	Kendaraan Dinas (3)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (3)	BPJS Kesehatan (3)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan hasil RUPS.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.15 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.59 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.42 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.68 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.53 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	06 April 2021	3	1. Evaluasi terhadap Rencana Bisnis Triwulan I Tahun 2021. 2. Isu-isu strategis. 3. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis. 4. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank.
2.	13 Juli 2021	3	1. Evaluasi terhadap Rencana Bisnis Triwulan II Tahun 2021. 2. Isu-isu strategis. 3. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis. 4. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank.
3.	12 Oktober 2021	3	1. Evaluasi terhadap Rencana Bisnis Triwulan III Tahun 2021. 2. Isu-isu strategis. 3. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis.Dea 4. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat secara berkala (Triwulan) dalam setahun.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Sentot Sujiono	3	0	100%
2.	Bambang Wijanarko	3	0	100%
3.	Mujijat	3	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2021 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Anggota Pegawai Tidak Tetap. Namun, terdapat 1 (satu) penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Pegawai Tetap pada PT BPR Gunung Slamet Kas Tritih.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Nihil.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	11 Januari 2021	Sosial	Bantuan masjid Al Hikmah (semen 20 sak)	Masjid Al-Hikmah	Rp1.020.000,00
2.	11 Januari 2021	Sosial	Bantuan sembako untuk mahasiswa yang terpapar COVID-19	Mahad Imam Safii	Rp1.285.000,00
3.	15 Januari 2021	Sosial	Donasi Milad	MTS Muhammadiyah Wangon	Rp500.000,00
4.	19 Januari 2021	Sosial	Bantuan dana kegiatan Pokdar Kamtibnas	Pokdar Kamtibnas RW 02	Rp400.000,00
5.	08 Februari 2021	Sosial	Partisipasi Kegiatan Dies Maulidiyah	MI Darwata Maos	Rp1.200.000,00
6.	11 Februari 2021	Sosial	Bantuan untuk Polsek Selatan (semen 20 sak)	Polsek Selatan	Rp850.000,00
7.	11 Februari 2021	Sosial	Bantuan untuk Musholla Baitul Izzah Tritih (semen 20 sak)	Musholla Baitul Izzah Tritih	Rp850.000,00
8.	11 Februari 2021	Sosial	Bantuan pembelian Cat Decolit	TPQ Fatimah Green Hill	Rp1.620.000,00
9.	24 Februari 2021	Sosial	Bantuan doorprize (setrika, kipas angin, dll)	MTS Maarif NU 1 Jatilawang	Rp510.000,00
10.	24 Februari 2021	Sosial	Bantuan doorprize pembelian 5 buah setrika	Koperasi Karyawan Cahaya Tirta	Rp1.325.000,00
11.	27 Februari 2021	Sosial	Bantuan pembangunan mushola dan MCK	Mandala	Rp8.413.000,00

12.	27 Februari 2021	Sosial	Bantuan untuk Koramil Adipala (semen 20 sak)	Koramil Adipala	Rp1.060.000,00
13.	17 Maret 2021	Sosial	Partisipasi HUT Cilacap ke 165	Kodim	Rp5.000.000,00
14.	18 Maret 2021	Sosial	Bantuan dana di Kec. Maos HUT Cilacap dan pembelian 11 doorprize	PTPN Krumput Maos	Rp1.095.000,00
15.	19 Maret 2021	Sosial	Partisipasi HUT Cilacap ke 165 di Kec. Nusawungu	Kecamatan Nusawungu	Rp200.000,00
16.	29 Maret 2021	Sosial	Bantuan dana PPDB MI Maarif NU 1 Panusupan Jatilawang	MI Maarif NU 1 Panusupan Jatilawang	Rp250.000,00
17.	30 Maret 2021	Sosial	Partisipasi kegiatan HUT Cilacap ke 165 tingkat Kec. Jeruklegi	Kecamatan Jeruklegi	Rp200.000,00
18.	30 Maret 2021	Sosial	Bantuan Doorprize (setrika, dispenser, kipas angin, dll)	Perum PERHUTANI Jerulekgi	Rp655.000,00
19.	31 Maret 2021	Sosial	Partisipasi kegiatan Panca lomba Triwulan I 2021 tingkat SATBRIMOB POLDA JATENG	Polres	Rp1.500.000,00
20.	31 Maret 2021	Sosial	Partisipasi Diklatsar Calon Koti Mahatidana PAC Kroya	Mahatidana PAC Kroya	Rp100.000,00
21.	06 April 2021	Sosial	Partisipasi HUT SMP N 7 Cilacap	SMP N 7 Cilacap	Rp500.000,00
22.	07 April 2021	Sosial	Bantuan pembangunan masjid di Polsek Maos	Polsek Maos	Rp1.000.000,00
23.	08 April 2021	Sosial	Bantuan pembangunan musholla SMP N 2 Kroya (semen 20 sak)	SMP N 2 Kroya	Rp1.620.000,00
24.	13 April 2021	Sosial	Bantuan pembangunan semen 40 sak untuk Panti Asuhan Amanah Cilacap	Panti Asuhan Amanah Cilacap	Rp1.700.000,00
25.	14 April 2021	Sosial	Bantuan pembelian nasi kotak	Masjid Al Maksum Kroya	Rp150.000,00
26.	22 April 2021	Sosial	Bantuan dana ke PERTUNI	PERTUNI	Rp150.000,00
27.	22 April 2021	Sosial	Bantuan pembelian 50 sarung untuk Panti Asuhan Muhammadiyah Ajibarang	Panti Asuhan Muhammadiyah Ajibarang	Rp2.144.300,00
28.	24 April 2021	Sosial	Bantuan dana acara	Masjid Baitul	Rp250.000,00

			buka puasa untuk Masjid Baitul Fahmi Sampang	Fahmi Sampang	
29.	26 April 2021	Sosial	Bantuan dana THR untuk PPPSC Pasar Sidodadi	PPPSC Pasar Sidodadi	Rp150.000,00
30.	26 April 2021	Sosial	Bantuan ta'jil buka puasa bersama untuk Lapas kelas II Pasir Putih Nusakambangan	Lapas Pasir Putih Nusakambangan	Rp500.000,00
31.	28 April 2021	Sosial	Bantuan nasi kotak untuk buka puasa Masjid Al Maksum Kroya	Masjid Al Maksum Kroya	Rp150.000,00
32.	29 April 2021	Sosial	Bantuan pembangunan (semen 20 sak) untuk Yayasan Panti Asuhan Baitul Aitam	Yayasan Panti Asuhan Baitul Aitam	Rp850.000,00
33.	04 Mei 2021	Sosial	Partisipasi PPDB MTS N 4 Kebumen	MTS N 4 Kebumen	Rp500.000,00
34.	05 Mei 2021	Sosial	Bantuan sembako untuk tukang parkir dan becak di Cab. Maos	Tukang Parkir dan Becak	Rp657.000,00
35.	05 Mei 2021	Sosial	Bantuan nasi kotak untuk buka puasa	Masjid Al Maksum	Rp150.000,00
36.	07 Mei 2021	Sosial	Partisipasi Peringatan Hari Pendidikan di PDK Maos	PDK Maos	Rp1.000.000,00
37.	07 Mei 2021	Sosial	Bantuan dana untuk Yayasan Nurul Iman Kawunganten	Yayasan Nurul Iman Kawunganten	Rp300.000,00
38.	10 Mei 2021	Sosial	Partisipasi Kegiatan di SMA N 3 Cilacap	SMA N 3 Cilacap	Rp500.000,00
39.	10 Mei 2021	Sosial	Bantuan sembako lebaran untuk lingkungan kas Gunung Simping	Lingkungan Kas Gunung Simping	Rp228.300,00
40.	11 Mei 2021	Sosial	Bantuan dana THR untuk Paguyuban Pasar Adipala	Paguyuban Pasar Adipala	Rp200.000,00
41.	20 Mei 2021	Sosial	Bantuan dana untuk acara HUT SMP N 5 Kroya	SMP N 5 Kroya	Rp500.000,00
42.	27 Mei 2021	Sosial	Bantuan dana untuk PERTUNI	PERTUNI	Rp100.000,00
43.	31 Mei 2021	Sosial	Bantuan pembelian semen 20 sak untuk Gereja Kristen Jawa Cilacap	Gereja Kristen Jawa Cilacap	Rp880.000,00
44.	31 Mei 2021	Sosial	Partisipasi Wakaf Rumah Tahfidz Quran	Perbarindo DPD Jateng	Rp4.000.000,00
45.	26 Juni 2021	Sosial	Partisipasi kegiatan	SMP N 2 Adipala	Rp700.000,00

			Penyusunan KTSP Peserta DIdik Baru		
46.	02 Juli 2021	Sosial	Bantuan COVID-19	Kec. Nusawungu	Rp310.000,00
47.	27 Juli 2021	Sosial	Bantuan Gerobak Sampah	RT 02 RW 01 Karangsari Kawunganten	Rp1.750.000,00
48.	16 Agustus 2021	Sosial	Bantuan sembako untuk acara HUT RI di Kec. Maos (10 paket)	Kec. Maos	Rp750.000,00
49.	16 Agustus 2021	Sosial	Bantuan beras untuk HUT RI ke 76 dalam rangka penanganan COVID-19	Wilayah Kec. Jeruklegi	Rp500.000,00
50.	16 Agustus 2021	Sosial	Bantuan Sosial anak yatim piatu korban COVID-19	Anak Yatim Piatu	Rp1.950.116,00
51.	18 Agustus 2021	Sosial	Partisipasi acara HUT RI ke 76 di Ke. Nusawungu	Kec. Nusawungu	Rp250.000,00
52.	20 Agustus 2021	Sosial	Partisipasi acara Sedekah Laut 2021	Paguyuban Cilacap	Rp100.000,00
53.	27 Agustus 2021	Sosial	Bantuan Sembako untuk baksos di SMP N 3 Cilacap	SMP N 3 Cilacap	Rp1.290.000,00
54.	28 Agustus 2021	Sosial	Bantuan anak yatim dan tidak mampu di MI Maarif 03 Karangsembung	MI Maarif 03 Karangsembung	Rp500.000,00
55.	09 September 2021	Sosial	Bantuan dana untuk Korwilcam Purwojati Jatilawang	KORWILCAM Purwojati	Rp500.000,00
56.	13 September 2021	Sosial	Bantuan cat gedung mushola SMP N 1 Kroya	SMP N 1 Kroya	Rp1.192.000,00
57.	17 September 2021	Sosial	Bantuan dana pembuatan kaos SMP N 2 Nusawungu	SMP N 2 Nusawungu	Rp2.000.000,00
58.	21 September 2021	Sosial	Bantuan sponsor acara sepak bola MTS Kholidiyyah Kroya	MTS Kholidiyyah Kroya	Rp600.000,00
59.	01 Oktober 2021	Sosial	Bantuan sosial kemanusiaan	PMI	Rp1.000.000,00
60.	05 Oktober 2021	Sosial	Bantuan pembangunan TPQ Qurrota A'yun (semen 20 sak)	TPQ Qurrota A'yun	Rp500.000,00
61.	06 Oktober 2021	Sosial	Partisipasi HUT SMA N 1 Wangon	SMA N 1 Wangon	Rp300.000,00
62.	07 Oktober 2021	Sosial	Bantuan dana pemasangan pagar tangga MI Maarif 11 Pucung Kidul Kroya	MI Maarif 11 Pucung Kidul Kroya	Rp500.000,00
63.	07 Oktober 2021	Sosial	Bantuan pembangunan (semen	Musholla BNN, Masjid Durrotoy	Rp4.000.000,00

			93 sak)	Yatiemah, Mushola SDN Tritih Kulon 07	
64.	13 Oktober 2021	Sosial	Bantuan sponsorship untuk kegiatan Tenis HDKD	Rutan banyumas	Rp800.000,00
65.	13 Oktober 2021	Sosial	Bantuan beras (67 pack)	Lembaga ACT Cilacap	Rp2.000.000,00
66.	13 Oktober 2021	Sosial	Bantuan tempat sampah (6 buah)	MI Nurul Istiqomah Karangbolong Gombong	Rp565.000,00
67.	19 Oktober 2021	Sosial	Bantuan dana acara serah terima Batalyon 405	Kodim Jatilawang	Rp700.000,00
68.	22 Oktober 2021	Sosial	Partisipasi Lomba HPBI tingkat SD dan SMP tahun 2021	SMP N 4 Kroya	Rp700.000,00
69.	22 Oktober 2021	Sosial	Bantuan snack nampan untuk acara hari santri ke 7 di Kemenag Cilacap	Kemenag Cilacap	Rp1.700.000,00
70.	25 Oktober 2021	Sosial	Partisipasi dalam rangka HUT ke 76 BRIMOB POLRI	BRIMOB POLRI	Rp2.500.000,00
71.	27 Oktober 2021	Sosial	Partisipasi kegiatan bakti sosial di Pasar Adipala (30 kantong beras)	Pasar Adipala	Rp450.000,00
72.	03 November 2021	Sosial	Partisipasi project jambanisasi RC Cilacap Wijayakusuma	Cilacap Wijayakusuma	Rp3.000.000,00
73.	04 November 2021	Sosial	Partisipasi HUT PGRI Purwojati ke 76 Cab. Jatilawang	PGRI Purwojati	Rp500.000,00
74.	05 November 2021	Sosial	Bantuan dana HUT SMP N 1 Kebasen ke 38 Kas Sampang	SMP N 4 Kebasen Sampang	Rp300.000,00
75.	12 November 2021	Sosial	Partisipasi kegiatan bersih pantai	Kodim 07/03 Cilacap	Rp2.177.400,00
76.	19 November 2021	Sosial	Partisipasi HUT SMA N 1 Jatilawang ke 37	SMA N 1 JATILAWANG	Rp3.000.000,00
77.	23 November 2021	Sosial	Partisipasi kegiatan Bakti Sosial	Lingkungan Rest Area Karangjengkol	Rp1.460.000,00
78.	23 November 2021	Sosial	Partisipasi Doorprize HUT KE 75 (setrika dan miyako)	Perum Damri	Rp240.000,00
79.	23 November 2021	Sosial	Bantuan dana untuk PGRI Nusawungu	PGRI Nusawungu	Rp500.000,00
80.	23 November 2021	Sosial	Bantuan dana untuk HUT SMP N 3 Kroya	SMP N 3 Kroya	Rp500.000,00
81.	24 November 2021	Sosial	Partisipasi Acara	SMP N 2 Maos	Rp300.000,00

			Literasi Sekolah		
82.	25 November 2021	Sosial	Partisipasi HUT PGRI ke 76	PGRI Jatilawang	Rp300.000,00
83.	26 November 2021	Sosial	Bantuan kursi plastik untuk desa Babakan	Desa Babakan	Rp3.600.000,00
84.	03 Desember 2021	Sosial	Partisipasi Doorprize HUT Armada RI tahun 2021	Lanal Cilacap	Rp2.838.000,00
85.	03 Desember 2021	Sosial	Bantuan pembuatan rompi bordir untuk PDK Maos (pembentukan satgas COVID-19)	PDK Maos	Rp1.250.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil.					

BAB III
HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	:	PT BPR Gunung Slamet
Alamat	:	Jalan Dr. Wahidin No 31 Cilacap
Nomor Telepon	:	0282532871
Posisi Laporan	:	Desember 2021
Modal Inti	:	Rp166.611.992.595,00
Total Aset	:	Rp791.646.392.896,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Gunung Slamet Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

a. Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)

b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.45	0.290
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.46	0.183
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	2.87	0.072
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.60	0.260
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.21	0.221
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.38	0.238
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.01	0.201
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.35	0.176
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	0.150
Nilai Komposit			**2.000**
Predikat Komposit			**Baik**

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.45)

a. Anggota Direksi sudah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku saat ini yaitu BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) harus memiliki paling sedikit 3 orang Direksi dan salah satunya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
b. Anggota Direksi diangkat setelah lulus uji fit & proper oleh OJK dan tidak ada rangkap jabatan.
c. Anggota direksi telah menyampaikan penerapan tata kelola kepada OJK, PERBARINDO dan media BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.46)

a. Anggota Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku saat ini yaitu BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) memiliki 3 orang anggota Dewan Komisaris termasuk memiliki Komisaris Independen.
b. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan namun belum maksimal.
c. Hasil rapat Dewan Komisaris sudah dituangkan ke dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 2.87)

a. BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sesuai ketentuan.
b. Komite Pemantau Risiko belum melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
c. Komite Audit belum melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.
d. Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris namun belum konsisten dalam melakukan tindak lanjut.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.6)

a. Pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan diselesaikan secara musyawarah, dan tidak akan merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
b. BPR sudah memiliki kebijakan & SOP benturan kepentingan tentang penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat kepada setiap pegawai dan pengurus BPR.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.21)

a. BPR sudah memiliki Direksi dan satuan kerja yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan OJK tentang modal inti BPR paling sedikit Rp. 80 milyar.
b. Meminimalisir setiap penyelewengan yang akan timbul dengan melalui sosialisasi dan pelatihan tentang seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang berlaku saat ini sesuai dengan peraturan OJK dan perundang-undangan yang lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.38)

a. BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
b. BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan hasil audit intern dan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

a. BPR telah menunjuk dan menugaskan audit ekstern yang sudah terdaftar di OJK dan telah memperoleh

persetujuan RUPS.
b. Ruang lingkup pelaksanaan audit ekstern telah sesuai dengan cakupan ketentuan OJK.
c. BPR telah menyampaikan laporan hasil audit ekstern kepada OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.01)

a. BPR telah membentuk satuan kerja manajemen risiko namun belum optimal dalam penerapan budaya manajemen risiko.
b. BPR telah menyusun dan melaporkan laporan profil risiko kepada OJK.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.35)

a. Laporan dan proses terhadap pemberian kredit besar oleh BPR belum seluiruhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian.
b. Laporan BMPK dilakukan secara berkala, benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan OJK.
c. BPR belum sepenuhnya melakukan pengkinian kebijakan, sistem, prosedur BMPK seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

a. BPR telah menyusun rencana bisnis yang dibuat oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, asas perbankan dan penerapan manajemen risiko serta menyampaikan kepada OJK.
b. BPR sudah memiliki rencana bisnis strategi jangka panjang sesuai dengan ketentuan OJK namun rencana penyelesaian permasalahan BPR belum maksimal.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

a. BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan ke OJK sesuai batas waktu dan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
b. Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR telah sesuai dengan ketentuan.
c. Laporan tahunan dan publikasi telah disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu.
d. Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Sesuai dengan ketentuan Regulasi, yaitu POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka kesimpulan umum atas self asssesment yang telah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian Tata Kelola dengan perolehan nilai komposit 2 dan peringkat Baik.
Mencerminkan bahwa manajemen bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut tidaklah signifikan dan dapat diselesaikan secara bertahap dengan tindakan normal oleh manajemen bank. Kelemahan-kerlemahan yang dijumpai oleh penerapan Tata Kelola di PT BPR Gunung Slamet sampai dengan Desember 2021 dalam pelaksanaan nya baik mencakup struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan tata kelola dapat diselesaikan secara bertahap dan sesuai ketentuan yang berlaku oleh manajemen bank.
Bank terus berusaha semakin meningkatkan penerapan Tata Kelola perusahaan ke arah yang semakin baik lagi dan senantiasa melakukan pemenuhan komitmen bank kepada regulator.

PT BPR Gunung Slamet
Jalan Dr. Wahidin No 31 Cilacap
Telepon: 0282532871
Website: www.bprgunungslamet.com. Email: bgsclp_31@yahoo.co.id

Cilacap, 26 April 2022

PT BPR Gunung Slamet

Menyetujui

Irawan Jayasaputra, SE		Sentot Sujiono, SH
Direktur Utama		Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR Gunung Slamet

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495394-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600614-26042022110247

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

xu2h_0801@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-26 11:02:47

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.